

PROLOG:

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA

DALAM PUSARAN

GLOBALISASI

EDITOR:

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.



**PANCASILA DALAM
PUSARAN GLOBALISASI**



Prolog

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Editor:

Al-Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M



LKIS
Pelangi Aksara

PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Dominikus Rato, Dina Tsalist Wildana, Muhammad Bahrul Ulum, dkk.
@CHRM2 UNEJ, *LKIS*, 2017

xviii + 440 halaman: 15,5 x 23 cm
1. Pancasila 2. Globalisasi

ISBN: 978-602-6610-23-2

Prolog: Prof. Moh. Mahfud MD
Editor: Al Khanif, Mirza Satria Buana, Manunggal Kusuma Wardaya
Penyelaras Bahasa: Muhammad Bahrul Ulum
Perwajahan Sampul/Buku: Dwi Agusatya Wicaksana
Setting/*Layout*: Tim Redaksi

Penerbit & Distribusi:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
<http://www.lkis.co.id>
e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration
(CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2017

Percetakan:

LKIS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: lkis.printing@yahoo.com

PANCASILA: REFLEKSI SADAR IDEOLOGI SEBAGAI ANTI-VIRUS RADIKALISME

Fiska Maulidian Nugroho

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*filosofische grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*way of life*) yang merupakan sumber nilai, inspirasi serta dasar interpretasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, wajib diaktualisasikan ke dalam proses dan seluruh produk per-undang-undangan serta berbagai kebijakan penyelenggaraan negara.¹ Dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itu biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara. Dimana bangsa Indonesia rela dan bertanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyatnya serta ikut dalam perdamaian internasional.² Bangsa Indonesia menyatakan dirinya berideologi Pancasila agar menjadi suatu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.³ Selain itu Pancasila dapat disebut sebagai ideologi

¹ *Prosiding Kongres Pancasila IV* (PSP UGM, 2012) hlm. 9.

² Selanjutnya lihat Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi" (2008) 11 hlm. 6. yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

³ Cholisin, *PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SAAT INI* (Kulon Progo) hlm. 1 Soerjanto Poespowardojo.1991. Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi PandanganHisup Bersama, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa danBernegara, Jakarta: BP-7 Pusat.

dalam arti netral, yaitu ideologi dengan sistem berpikir serta tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut dapat diketemukan wujudnya pada tataran ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.⁴

Selain dalam arti yang netral tersebut, ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya juga merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka tersebut hanya hidup di negara yang bersistem demokratis. Terbuka dalam artian dirinya dapat membuka ruang kesepakatan untuk mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar. Adapun kesepakatan tersebut adalah tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara dan juga mengenai bentuk institusi- institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi. Pancasila juga memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun Sosialisme-Komunis karena Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik.

Namun, untuk saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami beban Ideologis, diantaranya permasalahan yang dihadapi bangsa ialah radikalisme berbasis agama yang sangat mungkin mengancam demokrasi dan negara kesatuan di masa kini dan mendatang.⁵ Radikalisme yang dimaksud disini adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal (radikalisme), tergantung apakah lingkungan (habitus) mendukungnya atau tidak. Sedangkan radikalisasi tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh dengan signifikan karena berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya.⁶ Radikalisme agama adalah istilah yang tendensinya terlihat ketika suatu tindakan-tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama (Islam). Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara anarkis, yaitu merusak, melakukan kekerasan, demonstrasi disertai perusakan kantor atau lembaga-lembaga, mengerahkan animo massa disertai simbol-

⁴ Asshiddiqie, *supra* note 2 hlm. 1.

⁵ Lihat M. Fuad Nasar di Kementerian Agama RI, "Masa Depan Islam Moderat", *Maj Islam Kementerian Agama Islam RI* (2015) hlm. 14.

⁶ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal" (2012) 20:1 hlm. 83.

simbol atau atribut keagamaan tertentu. Dan hampir seluruh orasinya ketika demonstrasi adalah bersubstansikan pengobaran kekerasan.⁷

Virus radikalisme sudah menjalar dan terkait kasus yang berhubungan dengan radikalisme, terorisme, sangat diperlukan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat. Salah satunya adalah dengan penguatan terhadap iman-diri atas umat agama itu masing-masing.⁸ Karena selama ini di Indonesia telah berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan telah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga profil tokoh agama di dalam Forum tersebut diharapkan mampu merumuskan perannya secara persuasif guna mencegah bahayanya terorisme dan radikalisme. Nampaknya, radikalisme adalah salah satu dari instrumen ‘*racun*’ akibat adanya virus-virus radikal.⁹ Sangat tepat apabila radikalisme disebut pula sebagai suatu ‘virus’. Karena diluar konteks definitif

⁷ Ninin Prima Damayanti et al, “Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam” (2012) 3:1 J Kriminologi Indonesia, online: <<http://journal.ui.ac.id/jki/article/view/1119>> hlm. 3 Lihat pula, Afif, Muhammad. “Akar-akar Gerakan Islam Radikal”, available hlm. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm>.

⁸ Dalam tulisan ini Penulis mencoba merespon kalimat yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Era Jokowi dalam acara Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, 15 Desember 2016. Dirinya mencantumkan kalimat “virus radikalisme”. Sekilas latar belakang dalam tulisan ini adalah adanya virus radikal. Dan ketika ada virus maka harus timbul suatu upaya pencegahan maupun pemusnahan atau penanganan terhadap virus tersebut. Virus radikal perlu adanya pencegahan yakni vaksinasi. Sehingga upaya vaksinasi bertujuan agar virus radikalisme tidak terlalu jauh menggerogoti Bangsa Indonesia. Selain itu upaya vaksinasi tentu memerlukan sarana yang efektif untuk menyebarkan vaksin ke dalam jiwa dan ideologi masyarakat Indonesia. Sarana itu berupa *injeksi* atau kita kenal dengan menyuntikkan vaksin ke dalam jiwa (ideologi) manusia melalui beberapa jalan injeksi. Mendagri menggunakan Virus Radikal dalam pernyataanya, lihat di “Mendagri: Virus Radikalisme Sudah Menjalar”, online: <<https://news.detik.com/berita/3101206/mendagri-virus-radikalisme-sudah-menjalar>>.

⁹ Virus secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni *venom* yang berarti racun. Virus menjadi agen penyebab penyakit menular, maupun sesuatu hal yang dapat meracuni pikiran atau jiwa. Virus itu sendiri adalah organisme subsekuler yang karena ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektro. Ukurannya lebih kecil daripada bakteri sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus terkecil berdiameter hanya 20 mm (lebih kecil daripada ribosom), sedangkan virus terbesar sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Virus juga merupakan organisme yang sangat kecil yang tidak dapat hidup secara bebas jika dirinya tidak berada dalam sel inangnya. Lihat “Online Etymology Dictionary”, online: <<http://www.etymonline.com/index.php?term=virus>>. definisi atau pengertian virus itu sendiri pertama kali diketahui tahun 1955, dari bahasa Latin yaitu *venom*, virus tersebut berbeda-beda konteks pendefinisianannya, berupa medical definition of virus maupun definisi software “malware” pada komputer (perangkat lunak) “Virus | Definition of Virus by Merriam-Webster”, online: <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/virus>>. Lihat pula Artem Cheprasov, “What Are Viruses? - Definition, Structure & Function”, online: <<http://study.com/academy/lesson/what-are-viruses-definition-structure-function.html>>.

organisme ‘virus’ tersebut, virus yang dimaksud di sini adalah virus yang dapat meracuni pikiran dan jiwa manusia itu sendiri. Radikal dalam paham dan ismenya, biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, *force* (kekuatan) masyarakat dan teror.¹⁰ Terlebih lagi dalam dekade terakhir, dunia telah menyaksikan kebangkitan yang luar biasa dari apa yang disebut dengan ekstremisme dan radikalisme.¹¹ Teorisme menggunakan ancaman serta penggunaan kekuatan dengan tujuan membuat perubahan politik (*Brian Jenkins, Rand Corporation*).¹²

Begitu pula oleh *Federation Bureau of Investigation* (FBI) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekuatan yang melanggar hukum atau kekerasan terhadap orang-orang atau properti untuk mengintimidasi dan memaksa sebuah pemerintahan, populasi sipil, atau segmen lain-lainnya, dengan tujuan politik tertentu.¹³ Tore Bjorge menjelaskan bahwa terorisme merupakan masalah yang kompleks.¹⁴ Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari upaya para ahli untuk menguraikan terorisme melalui berbagai macam definisi untuk mengidentifikasinya. Terorisme juga dapat ditinjau dari bentuk tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya. Karena keberagaman definisi terorisme tersebut, maka tidak ada satu definisi tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia. Kompleksitas juga muncul karena faktanya label ‘terorisme’ digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam fenomena dengan lingkungan yang luas.¹⁵

Kejadian-kejadian terorisme yang pernah terjadi di Indonesia sejak Bom Bali I 2005 tidak hanya menysar simbol-simbol Amerika melainkan sudah menysar simbol-simbol yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam. Semua ini dapat dikatakan oleh penulis bahwa seluruh kejadian tersebut

¹⁰ Rokhmad, *supra* note 6 hlm. 83.

¹¹ Paul Cliteur, “State and religion against the backdrop of religious radicalism” (2012) 10:1 Int J Const Law 127 hlm. 127.

¹² Lihat Graeme R. Newman dan Ronald Y. Clarke Mangai Natarajan, “Kejahatan dan Pengadilan Internasional” in Mangai Natarajan, ed, *Int Crime Justice*, i ed (New York: Cambridge University Press, 2015) 1 hlm. 292.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ni Putu Elvina Suryani, *Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia (Mata Kuliah Terorisme di Indonesia)* (2012) hlm. 2 Lihat di Tore Bjorge (ed), *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Rorward* (London and New York, Routledge, 2005), hlm 1.

¹⁵ *Ibid.*

merupakan bagian dari fenomena radikalisme di Indonesia. Dari kejadian dan fakta-fakta tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa memang ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi teroris, menggembelng para calon teroris, mengajarkan ilmu teror, dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti pemahaman (Islam) ala teroris. Selain itu, ketika membahas tentang radikalisme dan terorisme. Ternyata keduanya bukan murni ciptaan Barat. Melainkan memang fakta nyata ada yang meyakini, memeluk, dan mengembangkannya dari kalangan umat Islam sendiri.¹⁶

Selama ini radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang. Sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadangkala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu.¹⁷ Dari uraian singkat diatas, nantinya akan diuraikan melalui konteks pencegahan dan pemberantasan radikalisme. Penulis sengaja meminjam istilah “Islam moderat” sebagai pengantar analisisnya. Istilah tersebut penulis pinjam bukan untuk mengenyampingkan unsur kepercayaan dan agama yang selama ini tertuang dalam ke-Bhinekaan Indonesia. Dimana pembahasan ini nantinya berusaha menyempitkan bingkai tulisan antara Islam yang moderat denga Islam yang radikal.

Konsekuensi Globalisasi

Mau tidak mau konsekuensi globalisasi mempengaruhi atmosfir budaya akan sadar Pancasila. Terutama kaum-kaum ekstrimis yang menginginkan sebuah gerakan revolusi (Islam) yang disinyalir selama ini memang bertujuan untuk mendirikan Negara sendiri di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia?. Patut diduga, sebaran pendidikan untuk memahami guna mengamalkan ideologi Pancasila masih belum

¹⁶ Ahmad Fuad Fanani, “Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda” (2013) 8: Menghalau Radikalisme Kaum Muda: Gagasan dan Aksi MAARIF Inst Cult Humanity 1 hlm. 4.

¹⁷ Ahmad Syafii Maarif menyatakan bahwa radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. *Ibid*.

teroptimalisasikan dengan baik. Maka sudah waktunya bagi masyarakat Indonesia bersatu padu meredam, menyadarkan, bahkan bila perlu wajiblah membumi hanguskan kelompok-kelompok radikal yang mungkin tidak bisa disadarkan. Kita dapat melihat kaum jihad yang bersikeras menghilangkan pengaruh Barat terutama Amerika Serikat. Teror atau jihad *qital* (jihad dalam pengertian membunuh) menjadi simbol dan metode perlawanan dalam memperjuangkan Islam yang Kaffah (totalistik). Bertujuan untuk menegakkan Syariah Islam sebagai hukum Negara dan Islam sebagai dasar Negara. Sehingga cita-citanya adalah membangun Negara Islam dan Khalifah Islamiyah. Kaum jihad juga terus melakukan tekanan-tekanan sosial politik yang tidak jarang dengan cara stabilitas politik dan keamanan. Bentuk-bentuk teror mereka arahkan sebagai hantaman bagi kekuatan demokrasi, menolak sikap-sikap liberal dalam bidang moralitas, gaya hidup, serta dana politik.¹⁸

Jangan sampai suatu arus globalisasi maupun gelombang reformasi mengakibatkan beberapa benturan-benturan di masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan selama ini, berupa keninabobo'an kaum-kaum pancasilais. Yakni, berleha-leha diatas proses demokratisasi. Entah itu sengaja atau memang merasakan ketiadaan hambatan dalam proses demokrasi. Ketika kita merasa acuh tak acuh maka yakinlah suatu saat peta pertarungan ideologi dunia hanya akan sedikit yang dapat kita ikuti. Lihat, eksklusifitas suatu kelompok massa yang memiliki kekuatan massa dan mereka membentuk kelompok-kelompok Islam yang militan atau ekstrim. Keekstriman tersebut memolitisir "Islam" sebagai ideologi-nya. Sehingga, memungkinkan kaum jihadi tersebut melakukan interaksi dan jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat Islam Timur Tengah yang memiliki kesamaan dalam misi dan garis perjuangannya. Terutama, sebelum adanya *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yaitu kelompok Al Qaeda yang pernah dipimpin oleh Osama bin Laden.¹⁹

Kelompok-kelompok radikal Islam tertedeksi secara aktif melakukan perekrutan dan secara terbuka menerima anggota baru. Bahkan, semakin terlihat transparan dalam gerakan dan gerilyanya. Seperti ungkapan Aman

¹⁸ As'ad Said Ali, "Pancasila di Tengah Pertarungan Ideologi Dunia" (2014) 1 Cendekia Waskita 1 hlm. 3.

¹⁹ Ali, *supra* note 18.

Abdurrahman dan Abu Bakar Ba'asyir secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kekhalifahan ISIS di balik jeruji penjaranya. Diperkirakan karena dukungan kedua tokoh ini akan mengakibatkan sebuah dorongan kepada pengikut-pengikutnya yang sukarela melakukan hal yaitu mengakui kekhalifahan yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi.²⁰ Dari situasi sedemikian rupa ini, dapat dikatakan bahwa perkembangan paham radikalisme di Indonesia diawali dari sempitnya pemahaman dari sekelompok umat beragama. Aksi-aksi terorisme ditegarai timbul karena hegemoni dunia barat terhadap dunia ketiga, khususnya negara-negara Islam yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam konteks perang ideologi di tingkat global.²¹

Terlihat secara nyata bahwa beberapa unsur syariat atas hukum nasional di Indonesia, ditolak secara mentah-mentah oleh para kaum jihadi ini. Suatu ketika, penolakan ini ditegaskan oleh Abu Bakar Ba'asyir pada suatu risalah yang dibuat di LP Nusakambangan. Dirinya menyatakan bahwa para pejabat pemerintah yang mengelola tidak berdasarkan Islam *kaffah* maka tauhidnya dinyatakan batal dan menjadi kafir.²² Gagasan yang muncul sedemikian ini bagi Ba'asyir dapat dimaknai, bahwa meskipun selama ini pemerintah di Indonesia melaksanakan sebagian hukum Islam, namun apabila pemerintah itu tidak menjadikan Qur'an dan sunnah (Hadits) sebagai satu-satunya sumber hukum maka dapat dikatakan *kafir*. Transisi mengerikan yang terjadi akhir-akhir bukan hanya kelompok radikal Al Qaeda saja. Namun, ada momok yang lebih dianggap menakutkan lagi, yaitu adanya tendensi ISIS yang lebih hebat dalam soal merkrut pengantin atau anggota baru. Konkretnya ketika, beredarnya video ISIS di *Youtube* oleh seseorang Warga Negara Indonesia bernama Abu Muhammad al-Indonesia yang secara langsung mengajak dan memprovokasi umat muslim di Indonesia untuk menyertai jihad ISIS di Levant (Iraq dan Syria).²³ Sehingga, perlu disadari bahwa, masyarakat Indonesia perlu di injeksi dan

²⁰ Harry Budiman, "Fenomena ISIS dan Khilafah Islamiyah Nusantara" (2014) 1 Cendekia Waskita 83 hlm. 83.

²¹ *Ibid* hlm. 85.

²² Lihat Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh: Nasihat dan Peringatan Karena Allah untuk Para Penguasa Negara Karunia Allah Indonesia yang Berpenduduk Mayoritas Kaum Muslimin* (Jakarta: JAT, 2013) hlm. 15.

²³ Azyumardi Azra, "ISIS, Khilafah dan Indonesia: Respon Komprehensif" (2014) 1 Cendekia Waskita 97 hlm. 97.

di vaksinasi guna sebagai benteng dimana itu lebih diharapkan berfungsi efektif dan responsif serta dapat mencegah bahaya radikalisme yang berujung tindakan teror.

Injeksi Ideologi

Teroris berbeda dari penjahat karena teroris dimotivasi oleh ideologi mereka. Sementara, para penjahat dimotivasi oleh kerakusan atau perilaku manusiawi lainnya. Lihat dalam status ideologi yang mereka anut, yaitu ekstrimis Islam milisi kanan jauh melakukan serangan bom bunuh diri yang rutin di Palestina. Mereka tidak hanya menargetkan tempat-tempat ibadah, melainkan restoran dan tempat-tempat dimana banyak orang berkumpul. Ketika suatu tempat ibadah diserang, biasanya hal itu dilakukan karena alasan strategis atau taktis bukan sebagai latar ideologis. Dikemukakan oleh Graeme bahwa, justifikasi ideologi hanya sebagai penutup kekurangan senjata yang dimiliki pihak teroris. Sehingga, publisitas yang besar di dunia itulah dirinya semakin terlihat kekurangannya. Terutama masalah tentang perlengkapan senjatanya, untuk memperluas kekuasaan. Bagi mereka, justifikasi ideologi menjadikan dirinya membabi buta. Bahkan, justifikasi ideologi tersebut adalah sebagai kartu As untuk menganggap benar setiap serangan-serangan yang mereka lakukan.²⁴

Sikap teroris seperti ini antara lain berupaya meminggirkan Undang-undang yang berlaku. Dapat dikatakan, bahwa dengan sikapnya yang radikal, maka mereka dapat dipastikan terlalu menginginkan perubahan secara mendadak. Keinginan mereka untuk menginginkan perubahan situasi yang mendadak tersebut seringkali menyebabkan kelompok manusia dengan sikap ‘radikal’-nya lebih cenderung menciptakan pendirian mereka sendiri. Pendirian yang diciptakan itu kesemuanya hanya untuk melaksanakan suatu misi dan usaha. Yaitu menolak undang-undang. Terutama terhadap undang-undang yang telah di-*iktiraf*-kan dalam suatu negara.²⁵

Pada tataran tertentu, kelompok-kelompok radikal bahkan secara terang-terangan menyatakan negeri ini masih menderita lantaran statusnya

²⁴ Lihat Graeme R Newman & Ronald V Clarke, “Terorisme” in Mangai Natarajan, ed, *Int Crime Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011) hlm. 294.

²⁵ Z U L Azmi Yaakob & Ahmad Sunawari Long, “Terorisme sebagai Cabaran Ideologi Muslim Masa Kini: Satu Analisis dari Perspektif Falsafah” (2015) 7 58.

yang masih *darul kuffar* atau negeri kafir. Para pemimpin dan seluruh aparaturnegara yang mendukung Pancasila pun di cap sebagai *thogut* atau para pembantu iblis. Karenanya, ‘jihad’ untuk menghancurkan tatanan negeri ini beserta seluruh aparaturnegaranya, merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda lagi. Sungguh tidak mengherankan, ketika Pancasila begitu dimusuhi oleh sekelompok radikal-terorisme. Bukan saja lantaran Pancasila dianggap tidak akomodatif terhadap cita-cita pendirian negara Islam, tetapi juga karena Pancasila dianggap menghalang-halangi upaya penegakan syariat Islam di bumi Indonesia.²⁶ Kembali menyoal tentang ketegasan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa Islam. Namun, bangsa yang memang mayoritas umat muslim sebagai penganut terbanyak. Selama ini bangsa Indonesia memang memiliki kekayaan budaya, tradisi dan bahasa yang sangat banyak dan beragam. Dari kemajemukan itulah terdapat perbandingan yang potensial antara sifat pluralitas dengan watak umat muslim yang ditinjau dari penduduk mayoritas. Dimana sifat pluralitas masyarakat Indonesia mau tidak mau harus diperhatikan secara baik oleh pemerintah. Antara pluralistik dan watak umat muslim kesemuanya berpengaruh pada suatu kelompok politik dan ideologi yang ada di Indonesia ini seperti upaya menentang ideologi Pancasila. Kedua faktor tersebut sering menjadi persoalan utama pemicu suatu kebencian maupun konflik. Mayoritas umat muslim Indonesia yang bercirikan dua unsur yaitu unsur kultur dan unsur agama serta kesemuanya itu dapat dikatakan memiliki ketersinggungan langsung terhadap radikalisme.

Diakui dari perjalanan yang terjadi selama ini terdapat pengaruh gerakan di luar garis *mainstream* Islam Indonesia atau gerakan transnasional terdapat kelompok keagamaan yang memiliki jaringan internasional. Kesemuanya datang ke suatu negara (Indonesia) dengan membawa paham keagamaan (ideologi) baru dari negeri seberang (Timur Tengah). Paham tersebut dinilai berbeda dari paham keagamaan lokal yang lebih dahulu eksis. Kelompok itu antara lain *al-Ikhwan al-Muslimin* (Gerakan Tarbiyah) dari Mesir, *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) dari Lebanon (Timur Tengah),

²⁶ Lihat Khoiril Anam, “Pancasila dan Terorisme: Sejarah Kelam dan Tantangan Penanggulangannya” in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Isu-Isu Kontemporer Indones*, cetakan pe ed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 239.

Salafi dari Saudi Arabia, *Shi'ah* dari Iran dan *Jamaah Tabligh* dari India/Bangladesh.²⁷

Keenam gerakan atau kelompok tersebut seakan-akan membawa angin yang berbeda bagi para umat muslim Indonesia. Entah sadar atau tidak sadar paham tersebut merongrong masuk bersaing dengan Ideologi dakwah Islam Indonesia, seakan-akan bersaing dengan dakwah Islam Moderat. Hal ini bertentangan dengan “negerinya kaum Muslim Moderat”. Kalimat yang pernah dilontarkan Abdurahman Wahid yang meyakinkan bahwa Indonesia adalah negeri bagi kaum Islam Moderat. Senada dengan Suryadharma Ali yang menyebut Islam Indonesia adalah Islam Moderat. Islam yang mengutamakan toleransi dan kebhinekaan.²⁸

Islam moderat sangat linier dengan suasana hati mayoritas umat muslim di Indonesia yakni merasa lebih nyaman, terlebih jika dakwahnya adalah melalui cara atau ajaran-ajaran jalan damai terutama dari para sufi Jawa. Lihat sejarah peradaban Islam moderat yang disebarkan secara damai, tidak memaksa atas pemeluk lain untuk memeluk agama Islam, penghargaan terhadap budaya yang tengah berjalan, dan memberikan akomodasi terhadap budaya lokal tanpa menghilangkan identitasnya. Sikap ini dilakukan oleh para Walisongo dalam menyiarkan Islam secara unik diantaranya menyerap elemen budaya-budaya lokal dan asing tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islam.²⁹

Penerjemahan dakwah dengan jalan damai dapat dibandingkan dengan jalan dakwah cabang-cabang disiplin Islam yang lainnya, disebabkan karena tasawuf sebagai jalan dakwah pada umumnya diyakini dan diakui sebagai jalan tempuh yang paling besar peranannya di wilayah penyebaran agama Islam.³⁰ Jalan diluar tasawuf yang dimaksud disini adalah penulis batasi pada wilayah *jihad* secara proporsional, proporsional itu bukan seperti

²⁷ Lihat pendapat Ahmad Syafi'i Mufid di Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia” (2014) 9 Islam J Studi Keislam.

²⁸ *Ibid*; Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006); “Kemenag Dorong UIN Jadi Kampus Riset”, *Koran Sindo Versi Online* (1 June 2014).

²⁹ Miftahuddin, “Akar Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis”, online: <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Miftahuddin,%20M.Hum./Akar%20Islam%20Moderat.pdf.> hlm. 5–6.

³⁰ Alwi Shihab, *The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia* Temple University, 1995) [unpublished] hlm. 18–19.

gerakan-gerakan radikal seperti peristiwa 9 September 2001 di New York, Pengeboman di Bali, Madrid, dan London dan terakhir di Paris di tahun 2015. Namun, Jihad di wilayah ini adalah pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri dan pemahaman literalistik atas teks-teks agama.³¹

Pemaknaan jihad yang tidak proporsional dan keliru adalah dimana pengertian jihad itu hanya dibatasi dengan perjuangan fisik atau perlawanan senjata. Terlebih dipaksakan untuk menggunakan senjata dalam berjihad. Muhammad Quraish Shihab berusaha meluruskan atas pemahaman jihad itu sendiri diungkapkan bahwa, selama ini kesalahpahaman jihad yang lebih dimaknai sebagai perjuangan fisik, antara lain diakibatkan oleh terjemahan yang kurang tepat atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara jihad dengan *anfus*, dimana kata *anfus* sering diterjemahkan sebagai jiwa (nyawa) yang kemudian dikesankan sebagai pengorbanan nyawa (fisik) saja.³²

Injeksi untuk menolak radikalisme adalah jalan dakwah yang damai dan tanpa membedakan agama manapun untuk mendapatkan pengakuan eksistensi mereka. Hal ini bisa dicapai ketika umat Islam memahami ideologi Pancasila secara menyeluruh. Tulisan ini sengaja hanya membatasi pada sudut pandang wilayah keeksistensian umat Muslim saja dan tidak bermaksud mengerdilkan agama maupun kepercayaan yang lain. Minimal umat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas bisa turut andil mencegah penyebaran virus teroris-radikalisme tersebut.

Beberapa hal yang harus dipunyai oleh umat Islam adalah harus mengimplementasikan paham moderat yang disebut dengan jalan tengah. Sebagaimana salah satu aktualisasinya adalah pada saat proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang bersepakat dintaranya Indonesia ditempatkan bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, yaitu negara islam.³³ Selain itu, umat Muslim Indonesia harus memiliki toleransi yang tinggi sebagai hasil dari dialektika antara agama dan keragaman budaya. Umat Muslim

³¹ Dede Rodin, "ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah atas Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam al-Qur'an" (2016) 10:1 29; Selanjutnya lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *as-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa at-Tatarruf* (Kairo: Dar Ary-Syuruq, 2001).

³² Rodin, *supra* note 31; Selanjutnya baca M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudl'ui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet-2 ed (Bandung: Mizan, 1996).

³³ Lihat Azyumardi Azra, *Islam Indonesia: Kontribusi Pada Peradaban Global* hlm. 5.

Indonesia harus lebih demokratis dengan menjadikan Indonesia sebagai *prototype* demokrasi di dunia Islam. Konsepsi pemikiran Islam Jalan tengah memiliki sifat yang tasawut (moderat), jalan tenah, non-ekstrimis yang berukuran kanan maupun kiri, dan yang selalu seimbang, inklusif, serta toleransi antar agama lain.³⁴ Hal penting yang harus dipahami oleh umat Islam di Indonesia adalah pentingnya melanggengkan dakwah dengan pendekatan kultural sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Walisongo secara sederhana.³⁵

Sedangkan secara teologis, mayoritas muslim Indonesia menganut persepsi *Ahlussunnah wal Jamaah*.³⁶ Sebuah persepsi Islam yang lentur terhadap budaya.³⁷ Paham ini menyimpan semangat menghargai tradisi, keragaman budaya, dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya.³⁸ Ini menarik, karena bila diperbandingkan dengan pemikiran Islam radikal, konon Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik di tangan Tuhan.³⁹ Gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenai batas-batas politik atau kedaerahan, prinsip *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi.⁴⁰ Sehingga dasar

³⁴ Lihat komentar Azyumardi Azra tentang model Islam Nusantara *bbc_Polemik-di-balik-istilah-Islam-Nusantara_06-15-15.pdf*.

³⁵ Lihat Suparjo Suparjo, "Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Masyarakat Muslim Indonesia" (2008) 2:2 KOMUNIKA 178.

³⁶ Lihat Ahmad Syafi'i Mufid, "Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Tantangan Kontemporer Dalam Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia" (2016) 12:3 Harmoni 8 hlm. 1.

³⁷ Islam Nusantara yang dipengaruhi tentang ajaran-ajaran Islam sangat bervariasi dan ini dipengaruhi oleh budaya pra Islam, sehingga Islam tidak menegaskan dirinya tidak menghancurkan budaya yang sudah lama ada, bahkan memadukannya. Selanjutnya lihat di Muhammad Arifin & Khadijah Binti Mohd Khambali, "Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei di Kuburan dalam Masyarakat Pidie Aceh)" (2016) 15 Jurnal Ilmiah Islam Futura 251-284 hlm. 3.

³⁸ Lihat Majalah "Bimas Islam", (2015).

³⁹ Gerakan radikalisme yang terbentuk saat ini memiliki beberapa alasan, salah satunya adalah ketidaksesuaian bentuk pemerintahan dengan ketentuan syariat Islam karena tidak dibentuk atas prinsip khilafah Islamiyah, dan perundang-undanganpun tidak berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. Selanjutnya Lihat pendapat Din Syamsudin, bahwa semestinya penegakan khilafah saat ini haruslah dalam kerangka NKRI, ke khilafahan yang menolak separatisme dan mengurangi inklusifisme serta pluralisme bangsa. *Radikalisme Agama & Tantangan Kebebasan*, cetakan pertama ed (Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2014) hlm. 19.

⁴⁰ Keidentikan menimbulkan perbedaan, lihat ketika *syura* diartikan sebagai proses pengambilan pendapat, berdasarkan suara mayoritas. Sedangkan demokrasi berawal ketika terdapat tipe pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya lihat di Abdul Razak, "Syura dan Demokrasi: Persamaan dan Perbedaannya" (2010) 25:3 Media Akad, online: <<http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediakademika/article/view/228>>.

ideologi adalah sebuah kepatutan dan syarat mutlak yang harus diterapkan pada lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia merupakan negeri yang multi-agama sekaligus multi-kultur.⁴¹ Bangsa Indonesia diplokanirkan menjadi negara bukan agama. Sekaligus bukan negara tanpa agama (alias sebagai negara sekuler)⁴². Inilah negeri dimana agama-agama diakui dan sekaligus mempengaruhi kebijakan politiknya. Antara agama dan negara dapat dikatakan sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang secara mayoritas telah dianut oleh penduduk Indonesia⁴³. Dan itu merupakan jumlah yang sangat besar dari keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta.⁴⁴ Ketika negara yang berideologi Pancasila diliputi oleh keragaman agama dan kultur, maka perlu kebijakan nasional guna membangun karakter bangsa untuk menghadapi dua faktor tersebut. Beberapa diantaranya adalah perlunya orientasi dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, mengoptimalkan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, meluruskan kembali nilai-nilai etika dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, memunculkan kembali kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, menghadapi secara integratif atas ancaman terhadap bangsa Indonesia dan menguatkan kemandirian bangsa.⁴⁵

⁴¹ Rizal Mubit, "Peran Agama dalam Multikulturalisme Indonesia" (2016) 11:1 Epistemé J Pengemb Ilmu Keislam, online: <<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/104>> hlm. 180.

⁴² Lihat Wildan Sena Utama, "Negara (dan) Islam: Sekitar Polemik Soekarno dan Natsir" (2013) Prisma Resour Cent, online: <<http://www.prismajurnal.com/issues.php?id=%7B1A0F06D5-DBC3-8F35-B5AE-E715E50BBFB0%7D&bid=%7B0327B60F-DE6E-539B-9979-18978AD362C0%7D>>.

⁴³ Meskipun telah terdapat riset yang menyatakan turunnya pemeluk atau penganut agama Islam di Indonesia. Lihat di "Data Riset: Di Indonesia Muslim Yang Murtag Makin Meningkat", online: *Elnury News* <<http://radioelnury.com/news/nusantara/data-ri-set-indonesia-muslim-yang-murtag-makin-meningkat.html>>; Pengelola Bersama, "Persentase Jumlah Umat Islam Berbagai Daerah di Indonesia", online: *Dok Pemuda TQN Suryalaya News* <<http://www.dokumenpemudatqn.com/2013/07/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai.html>>.

⁴⁴ Zuly Qodir, "Perpektif Sosiologis tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda" (2013) VIII MAARIF Inst Cult Humanity hlm. 46.

⁴⁵ Selanjutnya lihat di Cholisin, *supra* note 3.

Pilar-pilar Ideologi

Sampai saat ini ideologi Indonesia memiliki pilar-pilar *civil society* nan handal, yaitu antara lain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi kemasyarakatan ini telah memberikan kontribusi besar sehingga terwujud masyarakat Islam Nusantara yang moderat.⁴⁶ Kedua ormas ini menginjeksi pikiran alam bawah sadar kaum muslimin, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran di sekolah untuk menjinakkan virus radikal dalam diri siswanya. Sangat sederhana, ormas Islam seperti NU misalnya, menggunakan kegiatan keagamaan yang diperuntukkan kepada siswa-siswinya dengan sebutan pesantren kilat. Dilaksanakan saat masa liburan. Begitupun Muhammadiyah, juga sangat khas dengan istilah “Darul Arqam Dasar” (DAD). Meskipun seluruh kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan disiplin, tidak ada baiat (sumpah setia). Bahkan para pengajar (ustadz) tidak mengajari akan ketidak tundukan pada simbol-simbol negara. Sebagaimana elemen radikalisme yang mempertentangkan Islam dengan Indonesia dengan tidak tunduk atau hormat pada simbol-simbol Negara Indonesia.⁴⁷

Selain itu kita patut berkoreksi diri, bahwa selama ini sistem pendidikan dan pembelajaran memang banyak mendapatkan kritik. Pendidikan Indonesia dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi kurang dalam hal emosi dan moral. Terutama karakter dan budaya suatu bangsa harus dipertahankan agar identitas bangsa tersebut berbeda dengan yang lain. Padahal perwujudan atas Pancasila harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*). Sehingga, terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Sebagaimana Konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa konsep pendidikan kita patutlah menjadi suatu sistem among yang meliputi *ing ngarsa sung tuladha* (jika di depan memberi teladan, mengandung nilai keteladanan, pembimbingan dan pemanduan). *Ing madya mangun karsa*

⁴⁶ Azyumardi Azra, “Islam dan Negara-Bangsa: Pergulatan Politik Indonesia Masa Pasca Soeharto,” makalah tidak diterbitkan dalam Halaqah Fikih Kebhinnekaan yang diselenggarakan Maarif Institute di Jakarta (24-26 Februari 2015), 1. Lihat pula di Biyanto, “Berdamai dengan Pluralitas Paham Keberagaman” (2015) 5 Tasawuf Dan Pemikir Islam.

⁴⁷ Selanjutnya lihat Rokhmad, *supra* note 6.

(jika di tengah-tengah atau sedang bersama-sama menyumbangkan gagasan, yang bermakna peserta didik didorong untuk mengembangkan karsa atau gagasannya-mengandung nilai kreativitas dan pengembangan gagasan serta dinamisasi pendidikan). Terakhir, *tut wuri handayani* (jika dibelakang menjaga agar tujuan pendidikan tercapai dan peserta didik diberi motivasi serta diberi dukungan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan, mengandung nilai memantau, melindungi, merawat, menjaga, memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan, sambil memberikan kebebasan untuk bernalar dan mengembangkan karakter peserta didik) sebenarnya sarat akan nilai-nilai karakter.⁴⁸

Bahkan ditingkat mahasiswa tingkat perguruan tinggi, juga perlu diberikan titik kulminasi toleran yang sepadan dengan kerangka nasionalisme bangsa. Sebagaimana kerentanan yang pernah di ungkapkan *Azyumardi Azra*, bahwa radikalisme menjadi fenomena yang nyata. Ini terkuak setelah terdapat beberapa penelitian terhadap mahasiswa “*eks-rekrutmen*” telah berhasil keluar dari jaringan keagamaan yang radikal. Diterangkan pula bahwa gerakan radikal masih tetap massif terhadap Perguruan Tinggi Agama maupun Perguruan Tinggi Negeri.⁴⁹ Bahkan, di tahun 2010 terdapat temuan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu lembaga-lembaga pendidikan di Jabodetabek terdapat menyelenggarakan soal materi ajar dalam buku mata pelajaran agama yang bermuatan paham intoleransi dan radikalisme.⁵⁰ Hal ini sangat diperlukan kerjasama yang erat dari berbagai macam elemen pendidikan, mulai dari kepala pendidik, dosen, guru, orang tua siswa/mahasiswa dan masyarakat sekitar. Fungsinya adalah untuk mencegah radikalisme agar tidak tumbuh subur dikalangan pendidikan pada khususnya.

⁴⁸ Huriah Rachmah, “Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang” (2013) 1 E-J Widya Non-Eksakta hlm. 10–13.

⁴⁹ Lihat di Nurudin, “Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa” (2013) Harmoni, online: <<http://jurnal.balitbangdiiklat.kemendiknas.go.id/index.php/harmoni/article/viewFile/158/pdf>> hlm. 66.

⁵⁰ Survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian menemukan bahwa terdapat 48,9% siswa se wilayah Jabodetabek menyatakan persetujuannya atas aksi radikal Muhammad Thohir, “Radikalisme versus Pendidikan Agama Menggali Akar Radikalisme Dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama” (2015) 9 Nadwa J Pendidik Islam hlm. 70 Lihat juga Abdul Munip, “Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah”, dalam Jurnal Pendidikan Islam, (Vol. I, No. 2, Desember 2012), hlm. 160.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat titik tekan pembudayaan sadar ideologi Pancasila guna mencegah radikalisme tersebut. Diantaranya adalah melalui *injeksi* “*proses pendidikan*”. Diharapkan pada tataran ini, penerapan aplikasinya dapat berupa pedagogik (*pedagogy*). Dari pedagogik tersebut harus menerapkan ideologi Pancasila yang nantinya juga diharapkan dapat dilaksanakan sebagai suatu rujukan analisis sebagaimana sebuah pengetahuan, nilai, keinginan, dan relasi sosial itu dibentuk. Pedagogik ini disebut sebagai *Critical Pedagogy*⁵¹, yaitu sebuah penerapan yang dapat ditinjau dari aspek kajian *critical pedagogy* itu sendiri. Aspek kajian itu juga merupakan bagian dari ideologi kritis di dunia pendidikan. Pada Ideologi kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology* yaitu ke arah transformasi sosial. Transformasi sosial yang dalam praksisnya menekankan pembelajaran sebagai proses bagaimana memahami, mengkritik, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas dan mengubahnya.⁵²

Sementara tugas utama pendidikan itu sendiri adalah menciptakan ruang sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Dan pada akhirnya ketika mereka menyentuh dan mempelajari Pancasila, orang tersebut dapat sadar, bahwa apapun bentuk relasi sosial yang didasarkan pada nilai, budaya, dan tradisi selalu memiliki implikasi politik di antara pemegang kekuasaan.⁵³ Oleh karena itu, antara implikasi politik dan proses pendidikan, mengharuskan dirinya untuk menggunakan basis kemajemukan. Sebagai cara mengomunikasikan perbedaan secara benar dan cerdas dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena, secara tidak langsung konstelasi politik memiliki andil dalam pengaruh atas kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga, melalui penerapan *critical pedagogy* ini diharapkan mampu meletakkan Pancasila menjadi ideologi perekat etnis, budaya, dan agama. Meskipun pluralitas masih menjadi ancaman, setidaknya sekolah merupakan salah satunya lembaga

⁵¹ Lihat di Getahun Yacob Abraham, “Critical Pedagogy: Origin, Vision, Action & Consequences” (2014) 10:1 KAPET 90.

⁵² Tzabit Azinar Ahmad, *Implementasi Critical Pedagogy dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversial di SMA Negeri Kota Semarang* Universitas Sebelas Maret, 2010) [unpublished].

⁵³ Achmad Baedawi, “Paradok Kebangsaan Siswa Kita” (2013) VIII MAARIF Inst Cult Humanity hlm. 70.

yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter karena pendidikan adalah bagian dari perjalanan injeksi anti-virus terorisme.

Menggagas Vaksinasi Pancasila

Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap dan tidak berubah, dalam artian bahwa dengan jalan hukum apa pun tidak mungkin lagi untuk diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum.⁵⁴ Apabila terjadi perubahan, berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam pengertian seperti itulah maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.⁵⁵ Sudah menjadi harga mati dan tidak dapat ditawar lagi bahwa Pancasila merupakan asas tunggal yang berlaku di negara Indonesia ini. Jangan sampai terdapat ideologi ‘tandingan’ Pancasila.⁵⁶ Ideologi ‘tandingan’ memang secara terbuka akan sangat tidak mungkin ada, namun sedikit lambat laun dengan adanya masa keterbukaan sekarang ini, patut diwaspadai, karena perilaku sangat mungkin dapat terpengaruh ideologi-ideologi baru, dan nantinya akan mudah tertanam di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral, salah satunya dengan menggalakan ‘Vaksinasi Pancasila’ dengan harapan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang berkarakter kuat, baik secara individual maupun secara sosial. Vaksinasi Pancasila bertujuan untuk membentuk pribadi mereka yang ber-akhlak, moral dan budi pekerti yang baik.

Untuk bisa menanamkan ideologi Pancasila maka setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama*, menginjeksi aparatur negara dan elit politik dengan budaya serta nilai-nilai Pancasila. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir perilaku ‘klaim’ atas dirinya ‘parpol’ lebih baik

⁵⁴ Lihat pendapatnya Prof. Notonagoro Isti Maryatun, *Peran Prof. Notonagoro dalam Pengembangan Pancasila* hlm. 34.

⁵⁵ Lihat di Choirul Anam, “Pancasila sebagai Sistem Etika”, online: <http://choirul_umam.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46988/bab3-pancasila_sebagai_sistem_etika.pdf> hlm. 30-31.

⁵⁶ 4-5 Cholisin, *supra* note 3.

daripada ‘parpol’ yang lain. Pada kenyataannya, banyak elite parpol yang di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan berujung pada pemidanaan pelakunya. Begitu pula di lembaga yudisial, seperti hakim dan jaksanya yang juga ditangkap tangan oleh KPK karena dideteksi melakukan hubungan tidak wajar dengan pihak-pihak yang sedang di tangani kasusnya. Tidak kalah hebatnya lagi adalah area lembaga eksekutif seakan-akan lupa akan nasib pemilih atau konstituennya. Mereka lupa akan janji-janji manis ketika mencalonkan diri sebagai eksekutif.⁵⁷ Sehingga pengamalan Pancasila harus segera dimulai dari lembaga-lembaga pemerintahan maupun elite parpol sebagai wujud komitmen perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di setiap lini kehidupan mereka masing-masing.

Kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja penerus bangsa melalui doktrinasi Pancasila. Hal ini bisa dilakukan dengan doktrinasi bahwa ‘Negara Indonesia’ adalah Negara Pancasila dan Negara Pancasila adalah ‘Negara Indonesia’. Negara yang memang sejak awal didirikan untuk masyarakat Indonesia yang harus dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan seluruh martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Negara yang menginginkan agar masing-masing warga negaranya dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Kemudian, negara yang berkomitmen memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).⁵⁸ Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan sikap Pancasila. Doktrinasi tersebut sangatlah penting, karena apabila ditinjau dari sisi psikologisnya, remaja yang dimaksud pasti sedang memulai mencari jati diri. Terutama ketika mereka dapat membedakan hal-hal yang baik-benar dan buruk, menganalisis norma-norma yang membimbing tingkah lakunya, dan mensintesis

⁵⁷ Saparuddin, “Mengkontruksi Kembali Budaya Politik Bangsa dengan Semangat dan Nilai-Nilai Pancasila”, *E-Bul LPMP Sulawesi* (2014) 1.

⁵⁸ Mutiani, “Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila Untuk Demokrasi Indonesia” (2015) 2:2 *SOSIO Didakt Soc Sci Educ* J 176 hlm. 181; Lihat pula Edward S Greenberg, *Political Socialization* (United State of America: Aldine Transaction, 2009) hlm. 77.

nilai-nilai yang mereka peroleh saat memilih nilai-nilai tersebut dan nilai-nilai tersebut nantinya akan melekat kuat di dalam sanubarinya.⁵⁹

Ketiga, revitalisasi Pancasila lewat kontrol media baik cetak maupun elektronik. Asumsi yang perlu ditegaskan dari pemakaian media ini adalah sebagai alat revitalisasi. Ini disebabkan karena media massa di era global bukan hanya alat atau media penyebar informasi, pembentuk opini publik, penghibur masyarakat, namun dapat dijadikan media pengawasan terhadap kekuasaan yang berjalan di wilayah pemerintahan.

Sebegitu pentingnya media massa dikarenakan media massa masih terdapat beberapa tugas yang mestinya harus dilakukan setiap waktu. Terlebih ketika pusran Pancasila di era-demokrasi ini membutuhkan komitmennya. Komitmen itu antara lain yaitu, media massa harus menginformasikan dalam pengertian “*surveillance*” atau “*monitoring*” mengenai apa yang terjadi di sekitar masyarakatnya. Media massa harus mendidik mengenai makna dan manfaat dari fakta-fakta dengan tetap mempertahankan obyektivitasnya dalam menganalisis fakta itu. Media massa juga harus menyediakan satu *platform* untuk publik mengenai wacana politik, memfasilitasi pembentukan opini publik, dan menyiapkan opini balikan dari mana saja datangnya, media massa juga memberikan publisitas kepada pemerintah dan institusi lainnya.

Di sini media massa berperan sebagai “*watchdog*”, terakhir media massa dalam masyarakat demokratis melayani sebagai suatu saluran untuk kepentingan pemberdayaan (*advocacy*) mengenai berbagai titik pandang politik.⁶⁰ Bahkan media massa itu sendiri telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Pers dan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang harus menjaga moralitas, nilai agama, jati diri bangsa dilingkungan masyarakat majemuk yang memiliki sejumlah perbedaan. Ini berkaitan dengan komunikasi antar budaya, dan meng-

⁵⁹ Muhammad Na'im, *Kontribusi Apresiasi Pembelajaran Sejarah, Penghayatan Ideologi Pancasila dan Nilai-Nilai Agama Terhadap Sikap Nasionalisme* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014).

⁶⁰ Ibnu Hamad, “KONSTRUKSI REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA (Studi Pesisir Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999)” (2004) 8 Makara Sos Hum, online: <<http://www.academia.edu/download/38997453/73.pdf>> hlm. 29. Lihat pula Brian McNair, *An Introduction to Political Communication* (London: Routledge). Dan lihat pula Judith Lichtenberg, *Democracy and The Mass Media* (Cambridge: Cambridge University Press).

hindarkan selisih paham antar perbedaan-perbedaan guna menyesuaikan diri untuk menghadirkan media massa yang bermakna bagi nusa bangsa.⁶¹

Dapat dimaknai bahwa media massa selain diberikan tanggung jawab komitmen akan publisitas yang dapat dipertanggung jawabkan, juga diharapkan mampu memberikan kontrol sosial terhadap dirinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab atas hadiah perlindungan kebebasan pers oleh undang-undang. Selain itu posisi ini patut untuk difungsikan tersendiri ketika menyampaikan pesan, kritikan, dan pandangan yang berbeda terkait realitas-realitas majemuk di masyarakat terkait radikalisme. Posisi kontrol sosial tentunya disadari, pasti akan ada efek terhadap kredibilitas mereka masing-masing. Kredibilitas mereka diuji ketika media massa digunakan sebagai ajang propaganda diri maupun ideologi. Karena yang selama ini kita tahu bahwa nyawa dari media massa salah satunya adalah iklan. Sehingga, kecenderungan berbasis bisnis sepatutnya diimbangi pula akan presisinya terhadap Pancasila sebagai wacana tersendiri yang ditempatkan tersendiri oleh media massa sebagai wujud kredibilitasnya masing-masing.

Penutup

Sekalipun Bangsa Indonesia telah memiliki Ideologi Pancasila sebagai ruh yang hidup di jiwa masyarakatnya, namun setidaknya di era-globalisasi yang terbuka ini, memberi kesempatan terhadap ideologi-ideologi baru ingin masuk dan mempengaruhi sikap dan pandangan terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Radikalisme yang dapat dilihat dengan mata telanjang merupakan virus yang mau tidak mau harus dihempaskan di muka bumi ini terutama atas nama bangsa Indonesia yang majemuk berbhineka tunggal ika. Penanaman ideologi moderat merupakan hal penting karena pengaruh-pengaruh paham radikal sudah bertebaran bebas dalam pengaruhnya. Bahkan dunia pendidikan harus ikut berpartisipasi dalam mencegah paham radikal. Pemahaman yang kuat terhadap radikalisme setidaknya-tidaknya harus segera di injeksikan terhadap tiga unsur vital yang nantinya dapat berpengaruh terhadap perjuangan ideologi Pancasila. Ketiga unsur tersebut

⁶¹ Eko Harry Susanto, "Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun Demokratisasi di Daerah" (2011) 9:2 J Ilmu Komun 117 hlm. 121.

adalah, pertama, para pejabat pemerintah dan elite parpol, kedua para generasi muda penerus bangsa, ketiga adalah media massa guna alat revitalisasi informasi. Injeksi ideologi dan upaya pencegahan tersebut akan menjadi sebuah teori belaka ketika rakyat Indonesia tidak berkolaborasi secara baik. Kolaborasi itu setidaknya mengabaikan urusan kepentingan kaum mayoritas maupun kaum minoritas mereka masing-masing untuk sesaat.

Kolaborasi itu telah ditunggu oleh Pancasila sebagai Ideologi terbuka namun juga tidak berarti keterbukaan tersebut bisa diterjemahkan terbuka terhadap ideologi radikal. Injeksi memerlukan kesolidan antara umat Muslim sebagai mayoritas dengan umat lain (agama/kepercayaan) sebagai minoritas. Kesolidan itu berupa saling berintegrasi mencegah radikalisme serta berkomitmen bahu membahu meluluhlantakkan radikalisme. Indonesia negara yang sejuk, damai, dan ber-Bhineka Tunggal Ika, berbedabeda namun satu jua. Sedangkan “doktrinasi” dalam arti yang positif bukanlah hal yang mustahil dapat diterapkan, karena ketiga unsur yang harus didoktrin tersebut setidaknya memiliki kandungan ‘pelaku-pelaku’ yang masih baik dan berkomitmen. Komitmen tersebut perlu setiap saat ditagih oleh diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila.

Refzerensi

- Ahmad, Tzabit Azinar. *Implementasi Critical Pedagogy dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversial di SMA Negeri Kota Semarang* Universitas Sebelas Maret, 2010) [unpublished].
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *as-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa at-Tatarruf* (Kairo: Dar Ary-Syuruq, 2001).
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Tadzkirah: Nasihat dan Peringatan Karena Alloh untuk Para Penguasa Negara Karunia Alloh Indonesia yang Berpenduduk Mayoritas Kaum Muslimin* (Jakarta: JAT, 2013).
- Greenberg, Edward S. *Political Socialization* (United State Of America: Aldine Transaction, 2009).
- Lichtenberg, Judith. *Democracy and The Mass Media* (Cambridge: Cambridge University Press).

- McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication* (London: Routledge).
- Shihab, Alwi. *The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia* Temple University, 1995 [unpublished].
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudl'ui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet-2 ed (Bandung: Mizan, 1996).
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).
- Radikalisme Agama & Tantangan Kebebasan*, cetakan pertama ed (Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2014).
- Abraham, Getahun Yacob. "Critical Pedagogy: Origin, Vision, Action & Consequences" (2014) 10:1 KAPET 90.
- Ali, As'ad Said. "Pancasila di Tengah Pertarungan Ideologi Dunia" (2014) 1 Cendekia Waskita 1.
- Anam, Khoirul. "Pancasila dan Terorisme: Sejarah Kelam dan Tantangan Penanggulangannya" in Al Khanif, ed, *Pancasila sebagai Realitas Percik Pemikir tentang Pancasila Isu-Isu Kontemporer Indonesia*, cetakan pe ed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 239.
- Arifin, Muhammad & Khadijah Binti Mohd Khambali. "Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei di Kuburan dalam Masyarakat Pidie Aceh)" (2016) 15 J Ilm Islam Futura 251.
- Asshiddiqie, Jimly. "Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi" (2008) 1 1.
- Azra, Azyumardi. "ISIS, Khilafah dan Indonesia: Respon Komprehensif" (2014) 1 Cendekia Waskita 97.
- Baedawi, Achmad. "Paradok Kebangsaan Siswa Kita" (2013) VIII MAARIF Inst Cult Humanity.
- Biyanto. "Berdamai dengan Pluralitas Paham Keberagaman" (2015) 5 Tasawuf Dan Pemikir Islam.
- Budiman, Harry. "Fenomena ISIS dan Khilafah Islamiyah Nusantara" (2014) 1 Cendekia Waskita 83.
- Cliteur, Paul. "State and religion against the backdrop of religious radicalism" (2012) 10:1 Int J Const Law 127.
- Damayanti, Ninin Prima et al. "Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam"

- (2012) 3:1 J Kriminol Indonesia, online: <<http://journal.ui.ac.id/jki/article/view/1119>>.
- Fanani, Ahmad Fuad. “Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda” (2013) 8: Menghalau Radikalisme Kaum Muda: Gagasan dan Aksi MAARIF Inst Cult Humanity 1.
- Hamad, Ibnu. “KONSTRUKSI REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA (Studi Pesan Politik dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999)” (2004) 8 Makara Sos Hum, online: <<http://www.academia.edu/download/38997453/73.pdf>>.
- Harry Susanto, Eko. “Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun Demokratisasi di Daerah” (2011) 9:2 J Ilmu Komun 117.
- Kementerian Agama RI. “Masa Depan Islam Moderat”, *Maj Islam Kementeri Agama Islam RI* (2015).
- Miftahuddin. “Akar Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis”, online: <<http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Miftahuddin,%20M.Hum./Akar%20Islam%20Moderat.pdf>>.
- Mubit, Rizal. “Peran Agama dalam Multikulturalisme Indonesia” (2016) 11:1 Epistemé J Pengemb Ilmu Keislam, online: <<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/104>>.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. “Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Tantangan Kontemporer Dalam Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia” (2016) 12:3 Harmoni 8.
- Mutiani. “Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila Untuk Demokrasi Indonesia” (2015) 2:2 SOSIO Didakt Soc Sci Educ J 176.
- Natarajan, Mangai. “Kejahatan dan Pengadilan Internasional” in Mangai Natarajan, ed, *Int Crime Justice*, i ed (New York: Cambridge University Press, 2015) 1.
- Newman, Graeme R & Ronald V Clarke. “Terorisme” in Mangai Natarajan, ed, *Int Crime Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
- Nurudin. “Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa” (2013) Harmoni, online: <<http://jurnal.balitbangdiklat.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/viewFile/158/pdf>>.
- Qodir, Zuly. “Perpektif Sosiologis tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda” (2013) VIII MAARIF Inst Cult Humanity.

- Rachmah, Huriyah. “Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Yang” (2013) 1 E-J Widya Non-Eksakta.
- Razak, Abdul. “Syura dan Demokrasi: Persamaan dan Perbedaannya” (2010) 25:3 Media Akad, online: <<http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediakademika/article/view/228>>.
- Rodin, Dede. “ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur’an” (2016) 10:1 29.
- Rokhmad, Abu. “RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL” (2012) 20:1.
- Saparuddin. “Mengkontruksi Kembali Budaya Politik Bangsa dengan Semangat dan Nilai-Nilai Pancasila”, *E-Bul LPMP Sulawesi* (2014) 1.
- Sena Utama, Wildan. “Negara (dan) Islam: Sekitar Polemik Soekarno dan Natsir” (2013) Prisma Resour Cent, online: <<http://www.prismajurnal.com/issues.php?id=%7B1A0F06D5-DBC3-8F35-B5AE-E715E50BBFB0%7D&bid=%7B0327B60F-DE6E-539B-9979-18978AD362C0%7D>>.
- Suharto, Toto. “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia” (2014) 9 Islam J Studi Keislam.
- Suparjo, Suparjo. “Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Masyarakat Muslim Indonesia” (2008) 2:2 KOMUNIKA 178.
- Thohir, Muhammad. “Radikalisme versus Pendidikan Agama Menggali Akar Radikalisme Dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama” (2015) 9 Nadwa J Pendidik Islam.
- Yaakob, Z U L Azmi & Ahmad Sunawari Long. “Terorisme sebagai Cabaran Ideologi Muslim Masa Kini: Satu Analisis dari Perspektif Falsafah” (2015) 7 58.
- “Kemenag Dorong UIN Jadi Kampus Riset”, *Koran Sindo Versi Online* (1 June 2014).
- “Bimas Islam”, (2015).
- Anam, Choirul. “Pancasila sebagai Sistem Etika”, online: <http://choirul_umam.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46988/bab3-pancasila_sebagai_sistem_etika.pdf>.
- Azra, Azyumardi. *Islam Indonesia: Kontribusi Pada Peradaban Global*.

- Bersama, Pengelola. “Persentase Jumlah Umat Islam Berbagai Daerah di Indonesia”, online: *Dok Pemuda TQN Suryalaya News* <<http://www.dokumenpemudatqn.com/2013/07/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai.html>>.
- Cheprasov, Artem. “What Are Viruses? - Definition, Structure & Function”, online: <<http://study.com/academy/lesson/what-are-viruses-definition-structure-function.html>>.
- Cholisin. *PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI SAAT INI* (Kulon Progo).
- Maryatun, Isti. *Peran Prof. Notonagoro dalam Pengembangan Pancasila*.
- Na'im, Muhammad. *Kontribusi Apresiasi Pembelajaran Sejarah, Penghayatan Ideologi Pancasila dan Nilai-Nilai Agama Terhadap Sikap Nasionalisme* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014).
- Suryani, Ni Putu Elvina. *Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia (Mata Kuliah Terorisme di Indonesia)* (2012).
- “Mendagri: Virus Radikalisme Sudah Menjalar”, online: <<https://news.detik.com/berita/3101206/mendagri-virus-radikalisme-sudah-menjalar>>.
- “Online Etymology Dictionary”, online: <<http://www.etymonline.com/index.php?term=virus>>.
- “Virus | Definition of Virus by Merriam-Webster”, online: <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/virus>>.
- Prosiding Kongres Pancasila IV* (PSP UGM, 2012).
bbc_Polemik-di-balik-istilah-Islam-Nusantara_06-15-15.pdf.
- “Data Riset: Di Indonesia Muslim Yang Murtad Makin Meningkatkan”, online: *Elnury News* <<http://radioelnury.com/news/nusantara/data-riset-indonesia-muslim-yang-murtad-makin-meningkat.html>>.

